

Reforma Agraria, Jalan Baru Jokowi

Bernhard Limbong

Doktor Hukum Pertanian Unpad, Bandung

TANAH tidak boleh menjadi alat penghisapan. Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah! (Ir Soekarno, Proklamator dan Presiden pertama RI) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan reforma agraria atau *landreform* sebagai salah satu program unggulannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konkretnya, reforma agraria menjadi strategi atau 'jalan baru' Jokowi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, mengurangi pengangguran, mempersempit kesenjangan sosial ekonomi. Hal itu sangat jelas dalam Nawacita butir kelima dari sembilan agenda prioritas.

Ketimpangan penguasaan sumber daya agraria memang menjadi persoalan krusial sejak Indonesia merdeka, terutama sejak era investasi di awal Orde Baru. Data Bank Dunia menyebutkan 10% orang terkaya Indonesia menguasai 77% dari total kekayaan di Indonesia. Laporan data perusahaan manajemen investasi global Credit Suisse 2014 menunjukkan 1% kelompok terkaya Indonesia menguasai 50,3% dari total aset uang dan properti di Indonesia.

Presiden akan mewujudkan *landreform* dengan meredistribusi 12,7 juta hektare (ha) lahan kepada rakyat melalui masyarakat hukum adat dan koperasi-koperasi di Tanah Air.

Landreform, menurut Jokowi, merupakan salah satu strategi dalam merealisasikan sistem ekonomi Pancasila yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Untuk itu pemberian konsesi pada koperasi menjadi wujud pemerataan kesempatan pengelolaan lahan yang selama ini lebih banyak dinikmati segelintir kalangan.

Objek tanah yang diproyeksikan untuk dibagikan kepada rakyat ialah tanah-tanah telantar milik BUMN dan BUMS.

Pertanyaannya, mampukah Jokowi mewujudkan ambisinya meredistribusi 12,7 juta ha lahan

kepada rakyat yang tidak memiliki lahan atau yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 ha per orang?

Faktanya, *landreform* yang dijanjikan sejauh ini berjalan sangat lambat. Realisasinya sampai dengan hari ini, baru mencapai 36 ribu hektare atau kurang dari 1%.

Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai produk turunan dari visi Nawacita Jokowi, redistribusi lahan ditargetkan mencapai 4,5 juta ha selama 2015-2019. Dalam Nawacita butir kelima disebutkan *landreform* untuk 9 juta hektare.

Jika tak ada terobosan-terobosan cerdas dan berani, era Jokowi tidak lebih baik ketimbang era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dalam 10 tahun, redistribusi lahan yang ditargetkan seluas 8,1 juta ha, yang terealisasi hanya 430 ribu ha atau 5,3%.

Butuh nyali besar

Mewujudkan reforma agraria di era liberalisasi tanah dewasa ini sungguhlah perkara besar. Ketimpangan penguasaan lahan yang demikian besar dan regulasi yang tidak memadai menuntut keberanian luar biasa dari seorang presiden selaku pemimpin eksekutif sekaligus kepala negara.

Paling tidak, keberanian terkait dua aspek. Pertama, keberanian mengeluarkan kebijakan. Redistribusi lahan hanyalah salah satu agenda dalam reforma agraria. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus berani mewujudkan keadilan ruang dan keadilan sektor melalui kebijakan pengendalian monopoli lahan dan perlindungan aset. Perlu keberanian ekstra juga untuk menyerahkan tanah-tanah yang subur untuk petani. Tidak sekadar tanah-tanah 'telantar'.

Keberanian kedua, penguatan kelembagaan reforma agraria dan politik anggaran yang dikombinasikan dengan kecerdasan para pembantu Presiden mencari skema atau pola lain untuk menyukseskan



PATTA AREADI

agenda reforma agraria.

Penguatan kelembagaan reforma agraria antara lain dengan menaikkan status Kementerian Agraria/BPN setingkat kementerian koordinator yang berada langsung di bawah komando Presiden.

Mengapa? Sebab, reforma agraria tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendanaan yang memadai untuk modal, ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjang, pemakaian teknologi tepat guna, dan pelatihan bagi mereka yang mendapatkan program reforma agraria. Tanpa semua itu, reforma agraria akan mengalami nasib serupa dengan agenda transmigrasi pada era Orde Baru, terutama dengan program inti plasma yang secara umum gagal.

Keberhasilan realisasi reforma agraria sangat tergantung pada

sinergitas dan kesiapan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dengan Kementerian Agraria/BPN sebagai ujung tombak yang ditopang oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal.

Dalam realisasinya, Presiden harus memastikan bahwa program kementerian dan lembaga terkait lainnya harus sinkron dengan agenda reforma agraria. Beberapa kementerian dan lembaga lain yang ikut menentukan ialah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bulog, Kementerian Ke-

uangan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.

Belajar dari Amerika Latin

Keberanian ketiga, mengeluarkan regulasi yang kuat dan pasti. Hingga kini Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria tak kunjung terbit. Sebaliknya, untuk kebutuhan ekspansi konglomerasi, pemerintah meluncurkan serial paket kebijakan ekonomi secara masif.

Presiden bahkan perlu mendorong DPR untuk membuat Undang-Undang Reforma Agraria sebagai undang-undang turunan dari 'undang-undang induk', yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sampai sekarang masih berlaku. Dalam UU Reforma Agraria itu harus tercantum jelas kelemahan yang bertanggung jawab atas keberhasilan reforma agraria. Sebutlah Kementerian Agraria/BPN sebagai *leading sector*.

Tak ada salahnya kalau kita belajar dari kisah sukses reformasi agraria di Venezuela. Sebelum 1998, terjadi kondisi ketimpangan penguasaan/kepemilikan tanah yang tergambar dari struktur berikut: 5% tuan tanah dan perusahaan besar menguasai 75% tanah, sedangkan 75% petani kecil hanya menguasai 6% tanah.

Pada 1998, tokoh reformasi yang progresif Hugo Chavez terpilih menjadi presiden. Pada 1999, ia menjadikan reformasi agraria sebagai agenda mendasak. Chavez memulainya dengan mendorong pembuatan konstitusi baru melalui jalur referendum pada 1999. Lahirlah Konstitusi Bolivarian, yang menjamin hak kaum tani atas tanah. Negara juga diwajibkan menyerahkan tanah-tanah subur dan produktif untuk dikelola rakyat demi ketahanan pangan.

Dalam Pasal 306 Konstitusi Bolivarian dituliskan, "Negara akan mempromosikan kondisi untuk pembangunan desa secara holistik, dengan maksud menghasilkan lapangan pekerjaan dan menjamin kesejahteraan kaum tani, dengan menggabungkannya dalam pembangunan nasional."

Sebagai turunan dari Konstitusi Bolivarian, pada 13 November

2001, terbitlah 49 paket UU yang didekritkan Chavez, termasuk UU Tanah yang baru yang menghapus ketidakadilan kepemilikan tanah sekaligus menyiapkan produksi pangan demi menjamin ketahanan pangan. Sejumlah kebijakan seperti pembangunan pabrik pengelolaan hasil pertanian, termasuk nasionalisasi perusahaan pertambangan, dilakukan Chavez. Proyek reformasi agraria kemudian diserahkan kepada sebuah lembaga bernama Institut Tanah Nasional.

Hasilnya, pada periode 1998-2010, pemerintah Bolivarian berhasil meningkatkan produksi pertanian nasional sebesar 44%, peternakan nasional dengan 82%, dan jumlah tanah yang digunakan untuk budidaya mencapai 48%. Pada 2011, Venezuela juga mencatat bahwa perikanan dan hasil laut telah meningkat 300% sejak tahun 1990-an.

Di era modern ini, kisah sukses reforma agraria Venezuela sungguh menarik untuk dipelajari. Chavez tampil pada 1998, persis tahun itu kita meluncurkan reformasi. Pada 2001, ia mendekritkan 49 paket UU yang proreformasi. Pada tahun itu, Indonesia meluncurkan Ketetapan MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Setelah 10 tahun lalu Chavez meluncurkan reformasi agraria, kini rakyat (petani) Venezuela menikmati hasil yang mengagumkan. Lalu, kita? Kita masih berjalan di tempat. Impor bahan kebutuhan pangan tetap tinggi. Harga-harga produk pertanian melambung fluktuatif.

Untuk itu, pihak terkait harus terus berjuang mewujudkan reformasi agraria sebagai solusi memecahkan dua persoalan besar sepanjang sejarah NKRI: menekan konflik agraria serendah-rendahnya dan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Upaya keras Presiden Jokowi mewujudkan reformasi agraria hari ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Bung Karno enam dekade lalu ketika mengesahkan UUPA 1960, "Revolusi Indonesia tanpa *landreform* sama saja dengan gedung tanpa alas, pohon tanpa batang, omong besar tanpa isi!"

Mengawal Program Desmigratif

Riza Multazam Luthfy

Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan tengah mencanangkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Juni 2017. Diluncurkannya program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menekan angka tenaga kerja Indonesia (TKI). Dengan menyediakan berbagai infrastruktur, pemerintah bermaksud memberikan dukungan kepada rakyat kecil agar mereka betah berada di desa dan enggan merantau ke luar negeri.

Pada tahun ini, pemerintah memasang target 120 desa migran produktif. Desa-desa itu akan dibangun di wilayah kabupaten/kota kantong TKI yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara

Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini merupakan terobosan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan *skill* orang-orang desa.

Motivasi merantau

Fenomena orang-orang desa yang pergi meninggalkan tanah kelahirannya antara lain dilatarbelakangi oleh minimnya peluang kerja. Sektor formal yang terlalu birokratis cenderung menyingkirkan mereka dari ajang persaingan. Sektor informal pun tidak lagi menampung jumlah pencari kerja yang setiap hari semakin membludak. Dari tahun ke tahun, pertambahan penduduk kerap tidak diimbangi dengan tersedianya lahan pekerjaan. Hal ini membuat orang-orang desa nekat mencari

sumber penghidupan ke kota dan luar negeri.

Orang Jawa mulai meragukan falsafah *mangan ora mangan sing penting kumpul* (makan tidak makan yang penting kumpul) yang dianggap terlalu basi dan layak ditinggalkan. Kini mereka sanggup membedakan prinsip hidup yang dipegang dan nilai-nilai usang yang mesti dibuang. Kurikulum pendidikan, perkembangan teknologi, dan perubahan kondisi sosial menyebabkan arus modernitas menelusup ke dalam diri mereka. Karena itu, dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, mereka mempertimbangkan faktor untung-rugi. Betapa rasionalitas selalu membimbing mereka dalam mengambil keputusan.

Aktivitas merantau juga didukung oleh ketidakberdayaan desa memaksimalkan potensi warganya. Fakta bahwa banyak pemuda (berumur 15 tahun sampai dengan 34 tahun) belakangan memilih men-

jadi buruh di daerah perkotaan, pinggir kota, dan sentra pengembangan industri menyebabkan desa tidak lagi produktif karena hanya digarap oleh orang berusia tua. Fenomena itu diperparah dengan asumsi para remaja bahwa perbaikan status sosial-ekonomi tidak mungkin diraih dengan menetap di wilayah pedalaman.

Dalam taraf tertentu, ekonomi memang bersifat rasional. Ia senantiasa berpihak pada kawasan yang lebih menjanjikan. Itulah mengapa, negara-negara industri dan kota-kota besar merupakan kawasan yang lebih produktif daripada desa, terutama dalam mengelola kegiatan ekonomi secara profesional dan modern. Dengan demikian, minat para investor pada kawasan-kawasan penarik tenaga kerja tersebut lebih besar dibanding dengan wilayah perdesaan. Bagaimanapun berspekulasi menanam investasi di kawasan terakhir dianggap kurang

menguntungkan dan memiliki risiko yang sangat tinggi.

Disguised unemployment

Lantaran ingin mengontrol kapasitas desa serta orang-orang yang bermukim di dalamnya, Program Desmigratif selayaknya didukung oleh semua pihak. Namun demikian, persiapan pemerintah dalam pembentukan desa migran produktif di sejumlah daerah harus benar-benar optimal. Demi menaui kesuksesan, upaya pengurangan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan patut menjadi prioritas utama.

Menurut T Gilarso (2004: 209), pengangguran di wilayah perdesaan sering disebut dengan pengangguran tersembunyi atau tak kentara (*disguised unemployment*). Orang-orang desa kerap disibukkan dengan pekerjaan meski kurang bernilai ekonomis. Padahal, jika dibiarkan secara terus-menerus, fenomena ini rentan melahirkan kasus kerusuhan dan kriminalitas yang tentu mengganggu harmoni desa.

Pemberantasan kemiskinan dengan mengutamakan posisi strategis sektor pertanian dan perdesaan terkait erat dengan penyediaan lapangan kerja serta pengurangan disparitas pendapatan dan aliran tenaga kerja dari bidang agraris ke bidang ekonomi lainnya. Atas dasar inilah, upaya pengentasan kemiskinan meniscayakan pemberdayaan lapisan masyarakat terbawah, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengalokasian akses pasar yang cukup memadai.

Dibutuhkan beragam strategi yang bisa diterapkan untuk beberapa lapisan masyarakat sekaligus. Hal ini dikarenakan, karakter kewirausahaan tidak mungkin tercipta dengan mudah. Dengan kata lain, perlu pemilahan program yang tegas antara misi sosial pengentasan kemiskinan dari misi ekonomi produktif dan pemberdayaan skala komersial menuju pengembangan akses pasar, sistem insentif, serta informasi harga yang berguna bagi segenap lapisan masyarakat (Bustanul Arifin, 2005: 32).

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105. (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MEDIA
INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSI (Alm)

Direktur Utama: Lestari Moerdijat

Direktur Pemberitaan/Penganggung Jawab: Usman Kansong

Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi

Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatra

Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat

Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djudjat Sudrajat, Eiman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhr Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong

Redaktur Senior: Djudjat Sudrajat, Eiman Saragih, Laurens Tato

Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi

Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi

Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Shombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan

Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Trivibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedia, Anes Wijaksana, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatinika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahman, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Stria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Anief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfitri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Gilda Eksa, Hafsan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harti, Ivan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Avanni Fatimah, Nurjajiyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Pupu Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandjo, Rommy Pujiyanto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Susmaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Tessa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum

Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Fiman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Raman (NTB); Bahaman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselant (Surabaya)

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Kepala Divisi: Budiana Indrastuti

Asisten Kepala Divisi: Tjahjo Utomo

Redaktur: Sri Purwandhari

CONTENT ENRICHMENT

Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki

Bahasa: Dony Tjptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnani, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas

Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi

Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Hariyadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosey Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkiana Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitara Z, Ryo Thaba Pratama Burhan, Sri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampang Destawan, Tutik Sunarsih

Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarnan

PENGEMBANGAN BISNIS

Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri

Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R

Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto

Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500;

Surabaya: (031) 5667359;

Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN

Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan)

Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Lilek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan,

Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoiril Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madura), Sunarwoto (Madiun)

Aceh: Aminuddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan),

Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru),

Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marlisyah,

Jambi: Solmi,

Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Loutan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amala (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcellinus Kelen (Jayapura)

Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303

Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110

Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERMS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN



MEDIA GROUP